

**LAMPIRAN 1 : CAPAIAN SDG'S / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>	<b>1.2.1*</b>	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	Menurun menjadi 7-8%	11
	<b>1.3.1 (a)</b>	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Cakupan peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui jaminan kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DKK	Meningkat menjadi 95%	1
	<b>1.3.1 (b)</b>	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan jamsostek	DISNAKER	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	7
	<b>1.3.2 (c)</b>	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	Dinsos	Meningkat menjadi 17,12%	100
			Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	Dinsos	tidak ada target nasional	100
	<b>1.3.1 (d)</b>	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Dinsos	Menurun menjadi 2,8 juta	18
			Persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Dinsos	tidak ada target nasional	33
			Jumlah rumah tangga yang menerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	Dinsos	tidak ada target nasional	1
			Persentase siswa miskin penerima bantuan untuk menempuh pendidikan dasar	Dindikpora	tidak ada target nasional	60
	<b>1.4.1 (a)</b>	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	DKK	Meningkat menjadi 70%	1
	<b>1.4.1 (b)</b>	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi	Persentase Anak Usia 1 tahun (12-23 bulan) yang	DKK	Meningkat menjadi 63%.	99

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
	<b>1.4.1 (f)</b>	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Cakupan rumah tidak layak huni	Dinsos	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang <b>dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta</b> untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	6
	<b>1.4.1 (g)</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Presentase APM SD sederajat	Dindikpora	Meningkat menjadi 94,78%	96,59
	<b>1.4.1 (h)</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Presentase APM SMP sederajat	Dindikpora	Meningkat menjadi 82,2%	87,15
	<b>1.4.1 (j)</b>	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Presentase kepemilikan akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Meningkat menjadi 77,4%	97
	<b>1.5.1 (e)</b>	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD	Meningkat menjadi 39 daerah	6
			Jumlah TAGANA yg dikerahkan ke lokasi bencana	Dinsos	Meningkat menjadi 151 ribu	9
			Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Dinsos	Meningkat menjadi menjadi 81,5 ribu	1
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 2:</b> MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	<b>2.1.1*</b>	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen)	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Dintanpangan	tidak ada dalam target nasional	114.4
	<b>2.1.1.(a)</b>		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita	DKK	Menurun menjadi 17%	4
	<b>2.1.2 (a)</b>	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dintanpangan	Menurun menjadi 8,5 %	
	<b>2.2.1.(a)</b>	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DKK	Menurun menjadi 28%	3
	<b>2.2.2*</b>	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi gizi buruk pada anak balita (0-60 bulan)	DKK	Menurun	0

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
			Tingkat Komsumsi ikan	Dinnakan	tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	1
	<b>2.3.2</b>	Rata-rata pendapatan dari produsen pangan skala kecil menurut jenis kelamin dan kelompok adat	Rata-rata pendapatan dari rumah tangga usaha pertanian	BPS	tidak ada target nasional	10
	<b>2.a.1</b>	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian	Perkembangan nilai investasi/laju investasi	BPS	tidak ada target nasional	2
			Presentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	DPMPTSP	tidak ada target nasional	0 (
			Presentase ketersediaan SDM bidang penanaman modal dan perizinan yang terlatih	DPMPTSP	tidak ada target nasional	100
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor bidang unggulan	DPMPTSP	tidak ada target nasional	100
			Presentase peningkatan penerbitan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)	DPMPTSP	tidak ada target nasional	n.a
			Persentasi peningkatan izin usaha penanaman modal (IUPM)	DPMPTSP	tidak ada target nasional	n.a
			Presentase peningkatan pelayanan perijinan melalui OSS	DPMPTSP	tidak ada target nasional	40 (
			Presentase peningkatan kepeminatan investasi	DPMPTSP	tidak ada target nasional	40 (
	<b>2.c.1</b>	Indikator anomali harga pangan	Harga gabah di tingkat petani (GKP)	Dintanpangan	tidak ada target nasional	4.
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA</b>	<b>3.1.1*</b>	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	DKK	Menurun menjadi 306	67
	<b>3.1.2*</b>	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	DKK	Meningkat menjadi 95%	1
	<b>3.1.2 (a)</b>	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DKK	Meningkat menjadi 85 %	1
	<b>3.2.1*</b>	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DKK	Menurun	15

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
	<b>3.3.5*</b>	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	DKK	Menurun	0
	<b>3.4.1</b>	Kematian akibat penyakit jantung, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	Penemuan penderita Diabetes Melitus (DM)	DKK	Menurun (tdk ada target nasional)	56
			Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	DKK	Menurun (tdk ada target nasional)	5
	<b>3.4.1 (b)</b>	Prevalensi tekanan darah tinggi	Penemuan penderita hipertensi	DKK	Menurun menjadi 24,3%	36
	<b>3.4.2 (a)</b>	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (masukan kemenkes)	DKK	Meningkat menjadi 280	2
	<b>3.5.1 (b)</b>	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	mantan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi	BNN, Dinsos	Meningkat(tidak ada target nasional)	
	<b>3.5.1 (c)</b>	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai standart pelayanan	BNN, DKK	Meningkat menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti menjadi 4.319	3
	3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahgunaan NAPZA Instansi Pemerintah yang telah dikembangkan/dibantu	BNN, DKK, Dinsos	Meningkat menjadi 85 %	
			Jumlah advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta	BNN	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Jumlah Informasi P4GN yang disampaikan kepada keluarga, pelajar, pekerja dan kelompok masyarakat	BNN, DPPKBPPPA	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Jumlah program Pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah,dunia usaha, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan	BNN	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Terwujudnya kemandirian masyarakat dan Stakeholder	BNN	Meningkat (tidak ada target nasional)	2

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
	3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Presentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	DPPKBPPPA	Meningkat menjadi 23,5%	48,05
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	DPPKBPPPA	Menurun menjadi 38	29
	3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Presentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmeetneed	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	7,19
			Unmeet need pelayanan kesehatan	DPPKBPPPA	Menurun menjadi 9,91%	5
			Persentase angka kasus HIV yang diobati	DKK	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	DKK	Meningkat (tidak ada target nasional)	8
	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	DKK	Meningkat menjadi minimal 95%	1
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	BPS	Menurun menjadi 5,4%	6,
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT</b>	4.1.1*	Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada tingkat 2/3, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, menurut jenis kelamin	Angka kelulusan SD/MI	Dindikpora	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Angka kelulusan SMP/MTs	Dindikpora	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Angka Kelulusan SMA/SMK/SMALB/MA	Dindikpora	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dindikpora	Meningkat menjadi 84,2%	92
	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dindikpora	Meningkat menjadi 81%	87
	4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dindikpora	Meningkat menjadi 84,6%	M
	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Presentase APK SD sederajat	Dindikpora	Meningkat menjadi 114,09%	112,1
	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Presentase APK SMP sederajat	Dindikpora	Meningkat menjadi 106,94%	95,40
	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	APK SMA/Sederajat	Dindikpora	Meningkat menjadi 91,63%	57
	4.2.2 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK DAUD/ TK	Dindikpora	Meningkat menjadi 77,20%	

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	OPD/ DINAS	TARGET NASIONAL	CAP KABU
			Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan (gedung & koleksi)	DINAS ARPUS	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase perpustakaan desa yang sudah dilakukan pembinaan	DINAS ARPUS	Meningkat (tidak ada target nasional)	0
			Jumlah sumber daya manusia Perpustakaan yang telah mengikuti bintek	DINAS ARPUS	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
			Persentase Peminjam Buku Perpustakaan terhadap jumlah pengunjung	DINAS ARPUS	Meningkat (tidak ada target nasional)	83
			Persentase perpustakaan yang aktif	DINAS ARPUS	Meningkat (tidak ada target nasional)	5
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah Pengelola SID yang dilatih	Dinpermades	Meningkat	1
	4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A	Dindikpora	Meningkat	0
Rasio APM Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B			Dindikpora	Meningkat	1	
Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SD/SDLB/ MI/Paket A			Dindikpora	Meningkat	0	
Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMP/SMPLB/ MTs/Paket B			Dindikpora	Meningkat	1	
Rasio APK Perempuan/ Laki-laki di SMA/SMK/ SMALB/MA/Paket C			Dindikpora	Meningkat	1	
	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Dindikpora	Meningkat menjadi 96,1%	98
	4.6.1.(b)		Persentase Angka Melek Aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	Dindikpora	Meningkat	98
	4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Presentase SD Negeri yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana	Dindikpora	Meningkat	64,32

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio OPD yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD	DPPKBPPPA	Bertambah sebanyak 16	
	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional ) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	1:1
	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	1
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	DPPKBPPPA	Meningkat menjadi 70%	1
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)	DPPKBPPPA	Meningkat menjadi 21 tahun	63
	5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	DPPKBPPPA	Meningkat	31
	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Presentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	DPPKBPPPA	Menurun menjadi 9,9%	7,19
	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	DPPKBPPPA	Meningkat menjadi 85%	1

**LAMPIRAN 2 : CAPAIAN SDG'S / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
<b>TUJUAN 7 :</b> MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA	<b>7.1.1*</b>	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	DPUPKP	Meningkat menjadi 96,6%	9
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
<b>TUJUAN 8 :</b> MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA	<b>8.1.1. (a)</b>	PDRB per kapita	PDRB per kapita (juta rupiah)	BPS	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	2
	<b>8.3.1. (a)</b>	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase tenaga kerja formal	BPS	51%	2
	<b>8.5.2*</b>	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS	Menurun (tidak ada target nasional)	4
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Disnaker	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase besaran pencaker yang ditempatkan	Disnaker	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	Disperindagkop	Meningkat (tidak ada target nasional)	P = 30 %
	<b>8.5.2 (a)</b>	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS	Menurun	
	<b>8.6.1*</b>	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Disnaker	Meningkat	4
	<b>8.7.1</b>	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)	Persentase dan jumlah anak usia 15-17 tahun, yang bekerja	BPS	Menurun (tidak ada target nasional)	1
<b>8.8.1</b>	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin dan status migran	Jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan	Disnaker	Menurun (tidak ada target nasional)		

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
	<b>9.2.1*</b>	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
	<b>9.2.1.(a)</b>	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	5
	<b>9.2.2*</b>	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja sektor industri terhadap total tenaga kerja	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Jumlah tenaga kerja di sektor industri	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	58
	<b>9.3.1*</b>	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Jumlah produk OVOP	Disperindagkop	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>9.3.2*</b>	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	Disperindagkop	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>9.4.1*.</b>	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur				
	<b>9.4.1.(a)</b>	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah emisi karbondioksida (CO2e)	DLH	berkurang, mendekati 26%	7
			Informasi status mutu air (SPM)	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase informasi status mutu udara ambien (SPM)	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	DLH	Menurun (tidak ada target nasional)	100
	<b>9.5.1</b>	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB				
			Alokasi APBD untuk penelitian dan pengembangan (juta)	Bag Litbang Bappeda	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
	<b>9.c..1. (b)</b>	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan teknologi informasi terintegrasi	Dinkominfo	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			Rasio Desa dan Kelurahan yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinkominfo	Meningkat (tidak ada target nasional)	1
			Rasio Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten	Dinkominfo	Meningkat (tidak ada target nasional)	6

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
	<b>10.1.1.(a)</b>	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	Menurun menjadi 7-8%	1
	<b>10.1.1. (d)</b>	Jumlah Desa Mandiri	prosentase desa/jumlah desa yang mempunyai predikat desa maju dan mandiri	Dinpermades	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	
	<b>10.1.1 (e)</b>	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Pertumbuhan Ekonomi	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	
			PDRB Perkapita	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
	<b>10.3.1</b>	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional hak asasi manusia	Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	
	<b>10.4.1.(b)</b>	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	% besaran pekerja buruh yang menjadi peserta jamsostek	Disnaker	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
<b>TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</b>	<b>17.5.1</b>	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	1. Persentase pelayanan perizinan online	DPMPTSP	Meningkat (tidak ada target nasional)	21,5 (OPD)
			2. Persentase perizinan yang bebas calo	DPMPTSP	Meningkat (tidak ada target nasional)	100
			3. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	Meningkat (tidak ada target nasional)	57,5
	<b>17.11.1</b>	Bagian negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global				
			Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan	Disperindagkop	Meningkat (tidak ada target nasional)	7
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	BPS	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
	<b>17.11.1 (a)</b>	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Nilai Ekspor non migas	Disperindagkop	Meningkat (tidak ada target nasional)	96.5

**LAMPIRAN 3 : CAPAIAN SDG'S / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN TEMANGGUNG PI**

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
<b>TUJUAN 6</b> : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	<b>6.1.1.(a)</b>	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Layanan Air Minum yang Layak	DPUPKP	Meningkat menjadi 100%	85
	<b>6.1.1.(b)</b>	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	DPUPKP, Dintanpangan	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	14
			Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	DPUPKP	tidak ada target nasional	85
	<b>6.2.1.(b)</b>	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan Sanitasi Pemukiman Yang Layak	DPUPKP	Meningkat menjadi 100%	80
	<b>6.2.1.(d)</b>	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa ODF (Open Defecation Free)	DKK	Meningkat (tidak ada target nasional)	7
	<b>6.3.2</b>	Proporsi sumber mata air dengan kondisi kualitas yang baik	Fasilitasi pengolahan air limbah pada usaha/ kegiatan skala kecil menengah	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>6.4.2</b>	(level of water stress) Ketersediaan air berdasarkan kebutuhan standar	Jumlah embung (buah)	DLH; DINTAN KP	Ada (tidak ada target nasional)	
	<b>6.5.1.</b>	Tingkat pelaksanaan manajemen sumber daya air terpadu (0-100)	Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	DPUPKP	ada (tidak ada target nasional)	85
	<b>6.b.1.</b>	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	Jumlah program terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	BAPPEDA; DPUPKP; DINKES; DLH	Ada	
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAPAIAN KABUPATEN</b>
<b>TUJUAN 11</b> : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	<b>11.1.1</b>	Proporsi populasi penduduk urban yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	DPUPKP	Menurun (tidak ada target nasional)	19
			% rumah tangga yang menggunakan jamban atau tempat buang air besar dengan menggunakan tangki	DKK	Meningkat (tidak ada target nasional)	3

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	OPD/ DINAS	TARGET NASIONAL	CAP KABU
	<b>11.4.1</b>	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan preservasi, perlindungan, dan konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi Pusat Warisan Dunia), tingkat pemerintahan (nasional, regional dan lokal), jenis belanja (belanja operasional atau investasi) dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta nir profit, sponsor)	Cakupan SDM kesenian	DISBUDPAR	Meningkat	
			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	DISBUDPAR	Meningkat	
			Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan.	DISBUDPAR	Meningkat	5
			Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME (Jumlah penghayat)/KEJAWEN	KESBANGPOL	Ada	
			Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah	DISBUDPAR	Meningkat	100 (OP (I
	<b>11.4.1.(a)</b>	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil		DISBUDPAR	ada	
	<b>11.5.1*</b>	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		BPBD	Menurun (tidak ada target nasional)	
	<b>11.5.1.(a)</b>	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		BPBD	Menurun menjadi 30%	
	<b>11.5.1.(b)</b>	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD	Meningkat	6,52
	<b>1.5.1.(c)</b>	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan		BPBD	ada	
	<b>11.6.1</b>	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik	Meningkatnya sarpras untuk pengumpulan dan pengelolaan sampah (unit)	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>11.7.1. (a)</b>	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan	Prosentase tersedianya luas ruang terbuka hijau (RTH) dari luasan wilayah Kota/Kawasan	DLH	Meningkat/ada	

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
	<b>12.b.1</b>	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati	Presentase peningkatan jumlah wisatawan	Disbudpar	Meningkat	12.2
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
<b>TUJUAN 13:</b> MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	<b>13.2.1</b>	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan pembentukan atau operasionalisasi kebijakan/strategi /rencana terpadu guna meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, dan membantu ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dengan cara yang tidak mengancam produksi pangan (termasuk rencana adaptasi nasional, berdasarkan kontribusi nasional, komunikasi nasional, pembaharuan laporan dua tahunan atau lainnya)	Jumlah emisi karbondioksida (CO2e) untuk masing-masing sektor :	DLH		
			a) Energi	DLH	Menurun	
			b) IPPU (Industrial Processes and Production Use)	DLH	Menurun	
			c) AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Landuse)	DLH	Menurun	
			d) Limbah	DLH	Menurun	
			Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara vegetatif (kampung iklim)	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>13.3.1</b>	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan PT	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	DLH	Meningkat (tidak ada target nasional)	20
<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>TARGET NASIONAL</b>	<b>CAP KABU</b>
BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN	<b>15.6.1</b>	Jumlah negara yang mengadopsi kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik	DLH	ada (tidak ada target nasional)	
	<b>15.a.1</b>	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	Meningkatnya sumber daya keuangan untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	DLH	ada (tidak ada target nasional)	

**LAMPIRAN 4 : CAPAIAN SDG'S / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN TEMANGGUNG PILAR H**

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Capaian K</b>
<b>TUJUAN 16:</b> PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH	<b>16.1.2.(a)</b>	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Persentase penanganan konflik sosial	Kesbangpol	Menurun (tidak ada target nasional)	0
	<b>16.1.3.(a)</b>	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Rasio KDRT pada perempuan dan anak	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	1:1
	<b>16.2.1</b>	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau tekanan psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	DPPKBPPPA	Menurun (tidak ada target nasional)	10
	<b>16.2.1.(b)</b>	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Presentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	DPPKBPPPA	Menurun	0,0
	<b>16.5.1.(a)</b>	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Bag. Hukum Setda		
	<b>16.6.1*</b>	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persentase PNS lulusan S2/S3	BKPSDM	Meningkat (tidak ada target nasional)	4,
			Promosi jabatan struktural secara terbuka	BKPSDM	Meningkat (tidak ada target nasional)	5
	<b>16.6.1 (a)</b>	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian	BPPKAD	Meningkat menjadi 60%	
	<b>16.6.1.(c)</b>	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Pembangunan Setda	Meningkat menjadi 80%	
	<b>16.6.2.(a)</b>	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap standar pelayanan	Ortala Setda	Meningkat menjadi 80%	
			Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat	Ortala Setda	Meningkat (tidak ada target nasional)	3
			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Ortala Setda	Meningkat (tidak ada target nasional)	8
			Terselesaikannya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	Ortala Setda	Meningkat (tidak ada target nasional)	84
			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	DPMPTSP	Meningkat (tidak ada target nasional)	100%

<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>KODE INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR NASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KABUPATEN</b>	<b>OPD/ DINAS</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Capaian K</b>
			Tingkat Kapabilitas APIP	Inspektorat	Meningkat (tidak ada target nasional)	2
	<b>16.6.2.(a)</b>	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Satpol PP	Meningkat (tidak ada target nasional)	100
	<b>16.9.1.</b>	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	DINDUKCAPIL	Meningkat (tidak ada target nasional)	
	<b>16.9.1.(b)</b>	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Meningkat menjadi 85%	64
	<b>16.10.1.(b)</b>	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan		DPPKBPPPA	Meningkat	
	<b>16.10.2*</b>	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Presentase PPID badan publik yang aktif	Dinkominfo	Meningkat	388 OPD (IK)
			Persentase (%) kegiatan lembaga penyiaran yg sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku	Bagian Humas Setda	Meningkat	100
			Persentase (%) Pelayanan Pengaturan Bidang Penyiaran	Bagian Humas Setda	Meningkat	100
			penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat per bulan	Dinkominfo	Meningkat	12X/1
			Jumlah lembaga, komunitas, kelompok organisasi masyarakat yang aktif melakukan diseminasi informasi	Dinkominfo	Meningkat	5
			Jumlah berita dan informasi yang bersifat lokal maupun nasional yang disampaikan kepada masyarakat	Dinkominfo	Meningkat	4X/1
			program dan acara lembaga penyiaran sesuai dengan P3SPS (Pedoman Program Penyiaran Standar Program Siaran) dan jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Dinkominfo	Meningkat	80
			Persentase peningkatan	Bagian Humas	Meningkat	90

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KABUPATEN	OPD/ DINAS	Target Nasional	Capaian K
	<b>16.b.1</b>	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual	BAGIAN HUKUM SETDA	Meningkat	
			Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi	BAGIAN HUKUM SETDA	Meningkat	80
			Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	BAGIAN HUKUM SETDA	Meningkat	
			Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan	BAGIAN HUKUM SETDA	Meningkat	